



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROBY DARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 404321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.473.234.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.098.234.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 763.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. MOBIL, BYD ATTO1 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 255.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 988.056.209

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.479.940.209

III. HUTANG

Rp. 279.401.478

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.200.538.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.